

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Pembangunan ekonomi akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi akan membantu memperlancar proses pembangunan ekonomi. Salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan, jika pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah mengalami kenaikan dari sebelumnya, maka daerah tersebut dapat dikatakan berhasil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Terutama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral ekonomi, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui laju pertumbuhan berbagai sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.

Menurut Amalia dkk. (2020), pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan output perkapita. Dalam pengertian ini mencakup aspek output ekonomi atau Produk Domestik Bruto dan aspek pertumbuhan penduduk. Kedua aspek tersebut dapat dijelaskan untuk melihat output perkapita dalam suatu wilayah yang digunakan untuk melihat gambaran mengenai tingkat kesejahteraan ekonomi rata-rata suatu populasi dalam suatu wilayah. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik dapat memberi gambaran perekonomian secara umum dalam suatu wilayah.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan adanya perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, baik terhadap perubahan sosial, perubahan struktur

perekonomian, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan antar wilayah (disparitas) dan pengangguran (Todaro&Smith, 2015). Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian kegiatan dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya dengan tujuan mendorong sektor riil, seperti pertanian, infrastruktur, industri pengolahan, dan lain-lain. Dengan adanya pembangunan dan pertumbuhan dalam berbagai sektor ekonomi, maka akan dengan sendirinya membuka kesempatan kerja, sehingga lapangan pekerjaan tersedia, pendapatan meningkat, pengangguran menurun serta kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sejati, 2020).

Dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan, sistem perekonomian di Indonesia saat ini menggunakan sistem otonomi daerah yang mengacu pada UU. No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sistem ini memberi kewenangan dan keleluasaan terhadap setiap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola serta memanfaatkan hasil sumber-sumber daya ekonomi yang terkandung di dalamnya untuk mengakselerasi pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah untuk memanfaatkan sumber daya lokalnya, mengidentifikasi sektor-sektor penggerak ekonomi dan mengelolanya secara efisien dan efektif (Nazarilmi dkk., 2025).

Oleh karena itu, pemerintah harus mengetahui sektor-sektor strategis dan menentukan suatu sektor ekonomi yang dapat dijadikan sebagai sektor unggulan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan diketahuinya sektor-sektor unggulan suatu daerah, akan memudahkan bagi para investor untuk menentukan lokasi yang potensial untuk berinvestasi, dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong

sektor tersebut, serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam suatu sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan. Sektor-sektor yang dijadikan sebagai sektor unggulan akan memberikan *multiplier effect* terhadap sektor-sektor lain, sehingga menciptakan hubungan antar sektor ekonomi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan, serta pembangunan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan.

Selain mengidentifikasi sektor unggulan, pemerintah daerah juga perlu memahami pergeseran dalam struktur ekonomi daerah menuju sistem perekonomian yang lebih berkembang, seperti provinsi atau nasional. Hal ini berfungsi agar pemerintah dapat mengamati dampak ekonomi nasional terhadap pertumbuhan daerah. Selain itu, langkah ini dapat membantu dalam menilai sejauh mana daya saing sektoral di daerah dibandingkan dengan perekonomian provinsi. Dengan demikian, tindak lanjut dalam menentukan sektor unggulan di daerah dapat dihubungkan dengan perekonomian yang lebih luas, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Dalam pembangunan regional, fenomena pergeseran struktur ekonomi antar wilayah memiliki intensitas, pola, dan tempo yang berbeda-beda, hal ini tergantung pada faktor endowment dan kebijakan daerah. Perubahan Struktural yang tidak merata akan mengakibatkan tantangan bagi pembangunan daerah karena dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi antar wilayah (Rodríguez-Pose & Wilkie, 2017).

Provinsi Maluku Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia yang dikenal dengan daerah yang kaya sumber daya yang melimpah, Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan Produk Domestik Bruto (PDRB) secara signifikan dan menjadi sorotan publik beberapa tahun terakhir karena merupakan provinsi dengan jumlah pertumbuhan ekonomi tertinggi di

Indonesia melebihi pertumbuhan ekonomi daerah lainnya. Provinsi Maluku Utara terdiri dari 10 Kab/Kota yang memiliki kondisi geografis dan potensi wilayah yang berbeda-beda. Pada tabel 1. dapat dilihat data pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024.

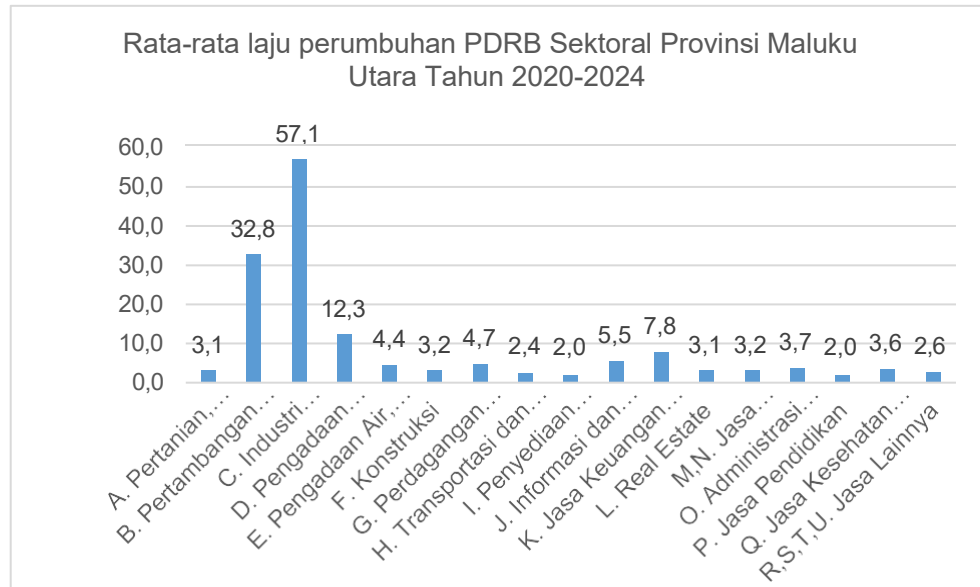
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Maluku Utara 2020-2024

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	Produk Domestik Regional Bruto (%)
2020	28.031.40	5.39
2021	32.739.00	16.79
2022	40.248.40	22.94
2023	48.494.70	20.49
2024	55.152.30	13.73

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Pada tahun 2020 di saat pandemi melanda Indonesia, perekonomian Provinsi Maluku Utara mengalami pertumbuhan positif dengan angka pertumbuhan 5.39% dengan nilai PDRB sebesar Rp. 28.031,40. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 saat pandemi covid-19 masih berlangsung justru mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan nilai PDRB sebesar Rp. 32.739,00 dengan angka pertumbuhan mencapai 16.79%. Pada tahun 2022-2024 saat masa pasca pandemi, laju pertumbuhan Provinsi Maluku Utara terus meningkat, dengan nilai PDRB sebesar Rp. 40.248,40 dengan angka pertumbuhan mencapai 22.94% pada tahun 2022 dan Rp.48.494,70 atau 20.49% pada tahun 2023, dan Rp. 55.152,30 atau 13.73 % pada tahun 2024. Dari data di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Maluku Utara terus konsisten bertumbuh yang tercermin dari peningkatan PDRB yang terus meningkat secara konsisten.

Tabel 1.2 Rata-rata laju perumbuhan PDRB Sektoral Provinsi Maluku Utara
Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Dari tabel 1.2 dapat diketahui rata-rata pertumbuhan PDRB sektoral di Provinsi Maluku Utara selama 5 tahun terakhir hanya ada 3 sektor yang tumbuh dominan dan paling berkontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Maluku Utara, yakni sektor Industri Pengolahan (57,1%), pertambangan dan penggalian (32,8%), serta pengadaan listrik dan gas (12,3%). Sementara untuk sektor-sektor lainnya hanya tumbuh dibawah 10% dalam 5 tahun terakhir, artinya sektor-sektor tersebut tidak terlalu berkontribusi signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan ekonomi yang mengalami lonjakan yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi yang ada di berbagai sektor ekonomi di Provinsi Maluku Utara belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis dan unggulan guna meningkatkan kinerja perekonomian daerah.

Tabel 1.3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kab/kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Kab/Kota Provinsi Maluku Utara	Tahun					Rata-rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Halmahera Barat	0,5	1,2	3,2	2,2	5,9	2,6
Halmahera Tengah	31,9	161,9	102,4	42,4	18,4	71,4
Kepulauan Sula	0,1	1,3	3,6	2,7	6,6	2,9
Halmahera Selatan	17,6	14,2	21,4	27,8	23,9	21,0
Halmahera Utara	-0,4	3,1	3,8	0,9	1,8	1,8
Halmahera Timur	0,2	8,9	1,2	26,6	3,6	8,1
Pulau Morotai	2,0	2,0	3,1	2,5	5,3	3,0
Pulau Taliabu	0,7	12,7	3,5	2,6	4,5	4,8
Kota Ternate	-1,6	2,6	5,3	5,0	8,8	4,0
Kota Tidore Kepulauan	1,1	1,2	3,2	2,5	6,4	2,9
Maluku Utara	5,4	16,8	22,9	20,5	13,7	15,9

Sumber : Badan Pusat Statistik Seluruh Kab/kota di Provinsi Maluku Utara

Pada tabel 1.3 Menunjukkan informasi mengenai laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di seluruh Kab/Kota Provinsi Maluku Utara. Secara rata-rata Kabupaten Halmahera Tengah merupakan Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 5 tahun terakhir, yakni mencapai rata-rata tingkat pertumbuhan 71,4%. Pada tahun 2021 dan 2022 Kabupaten ini tumbuh diatas 100% yang mengindikasikan terdapat sektor ekonomi yang sangat berkembang pesat di daerah tersebut. Selanjutnya, Kabupaten Halmahera Selatan tumbuh 21% secara rata-rata yang ditopang berbagai sektor ekonomi. Adapun Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan, hanya bisa tumbuh sebesar 4% dan 2,9% secara rata-rata. Adanya perbedaan kontribusi yang cukup signifikan antar daerah dalam pembentukan PDRB di Kab/kota Provinsi Maluku Utara mencerminkan bahwa setiap daerah memiliki konsentrasi sektor ekonomi yang berbeda satu sama lain. Demikian pula dengan masih rendahnya kontribusi di beberapa daerah terhadap PDRB Provinsi juga mengindikasikan bahwa masih terdapat sektor-sektor ekonomi dengan potensi unggulan yang belum tergali atau

diketahui prospek pengembangannya sehingga belum dapat dikatakan optimal dalam pengelolaannya.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antar daerah adalah penentuan sektor unggulan. Kebijakan ini diharapkan dapat mengembangkan sektor-sektor tersebut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan ekonomi yang baik di setiap daerah diharapkan menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan mendorong perekonomian di wilayah sekitarnya. Provinsi Maluku Utara, dengan karakteristik dan potensi sumber daya yang beragam, identifikasi unggulan di masing-masing kabupaten/kota sangat penting untuk pengembangan ekonomi wilayah.

Dengan melihat data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara yang meningkat secara signifikan, namun hanya beberapa sektor yang berkontribusi terhadap pembentukan PDRB 5 tahun terakhir serta adanya kesenjangan antar wilayah di Provinsi Maluku Utara, sehingga membuat peneliti melihat pentingnya mengetahui sektor-sektor mana yang layak dijadikan sebagai sektor unggulan dari setiap daerah di Provinsi Maluku Utara yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang pro terhadap masyarakat, agar pertumbuhan yang tinggi bukan hanya sekedar angka, melainkan dapat dirasakan dampaknya oleh seluruh kalangan masyarakat di Provinsi Maluku Utara dan. Hal ini yang menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Sektor Unggulan Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Sektor-sektor apa saja yang menjadi unggulan dalam perekonomian di seluruh Kab/Kota Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak di Kab/Kota Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi sektor-sektor basis dan prospektif serta menganalisis pergeseran struktur perekonomian untuk menentukan sektor unggulan di Kab/Kota Provinsi Maluku Utara. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tingkat penyerapan tenaga kerja jika terjadi pertumbuhan ekonomi di seluruh Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Pemerintah daerah, sebagai informasi strategis mengenai sektor-sektor basis, prospektif, dan unggulan yang layak menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan dan penciptaan lapangan pekerjaan.
2. Pelaku ekonomi, sebagai informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan menentukan usaha pada sektor ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

3. Para peneliti, sebagai bahan referensi, sumber data, dan bahan penelitian, serta studi ketenagakerjaan pada waktu mendatang.
4. Masyarakat Umum, sebagai wawasan kepada masyarakat mengenai potensi ekonomi di daerah mereka. Dengan informasi yang jelas mengenai sektor-sektor unggulan, masyarakat dapat lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan mendukung inisiatif pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut (Kuncoro, 2018), Pembangunan ekonomi daerah berhubungan dengan berbagai aspek seperti pengelolaan sumber daya alam dan manusia, penciptaan iklim usaha yang kondusif, kerja sama dengan pihak swasta, pengembangan infrastruktur, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerataan antar wilayah, menciptakan kesempatan kerja, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya secara optimal yang digunakan untuk membangun perekonomian daerah (Tumangkeng, 2018).

Tujuan Pembangunan ekonomi menurut (Siregar dkk., 2025) adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pemerataan pembangunan, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Dengan tujuan pembangunan yang jelas, pemerintah dapat menentukan strategi pengembangan daerah dengan potensi sumber daya yang dimiliki sehingga lebih terarah dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengembangkan suatu daerah diperlukan langkah-langkah strategis dengan menentukan sektor-sektor ekonomi mana yang dapat dijadikan

sebagai sektor basis dan prospektif untuk dikembangkan secara berkelanjutan (unggulan) sehingga diharapkan sektor-sektor inilah yang menjadi motor penggerak atau pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya diperlukan sumber daya termasuk sumber daya manusia (tenaga kerja) yang kompeten dan berdaya saing untuk mendukung perkembangan setiap sektor ekonomi yang bersangkutan. Pembangunan ekonomi juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditengah pertumbuhan yang mencakup penambahan lapangan kerja dan pemertahanan lapangan kerja. (Agbenyo and Agbenyo, 2020)

Menurut Susilowati & Putri (2024), ada empat langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi yaitu:

1. Strategi pengembangan daerah

Pengembangan fisik dan karakteristik suatu daerah memiliki peranan krusial dalam mendorong sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi positif terhadap kegiatan perekonomian. Strategi ini berfokus pada penguatan identitas kota atau wilayah dan peningkatan daya tarik lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu yang dilakukan adalah pengumpulan data mengenai sektor yang belum dimanfaatkan secara maksimal atau yang belum dikembangkan, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan kebijakan daerah.

Selain itu, pengendalian perencanaan dan pembangunan juga merupakan aspek penting dalam strategi ini. Dengan pengendalian yang tepat, iklim investasi dapat meningkat, yang pada akhirnya menciptakan perekonomian daerah yang lebih tumbuh. Ini melibatkan pengaturan yang cermat agar pembangunan

berlangsung secara berkelanjutan dan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

2. Strategi pengembangan dunia bisnis

Dalam upaya mengembangkan bisnis lokal, berbagai langkah strategis harus diimplementasikan melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sambil tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Salah satu langkah yang penting adalah menciptakan pusat informasi terpadu, yang akan memfasilitasi interaksi antara pelaku bisnis dan pemerintah daerah mengenai izin, rencana pembangunan ekonomi, dan informasi penting lainnya.

Selanjutnya, pengembangan sektor swasta juga menjadi salah satu langkah yang sangat penting. Perusahaan akan berperan sebagai penyerap tenaga kerja dan pendorong semangat kewirausahaan. Dengan dukungan pemerintah dan persaingan bisnis yang sehat akan menciptakan inovasi-inovasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM), atau yang dikenal sebagai human resources, merujuk kepada individu yang memiliki kesiapan, kemauan, dan kemampuan untuk berkontribusi terhadap tujuan negara. Sumber daya manusia dianggap sebagai komponen paling vital dalam proses pembangunan ekonomi, sehingga peningkatan kualitas dan keterampilan menjadi sangat penting. Selain itu, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan seluruh sektor ekonomi serta pemberian pelatihan secara berkala di daerah juga merupakan langkah yang sangat penting.

Dalam hal ini, peran pemerintah yang efektif dan pengendalian yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan dijalankan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, sehingga arah pembangunan menjadi teratur dan terarah. Penyusunan dan pelaksanaan metode serta strategi pembangunan ekonomi akan menentukan peran masing-masing pemangku kepentingan, baik masyarakat maupun pemerintah, dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Hal ini akan memastikan keterlibatan kedua pihak secara maksimal dan saling mendukung (Ikbal, 2018).

2.1.2. Teori Pembangunan Daerah

Lestari dkk. (2021), mengemukakan berbagai teori pembangunan daerah dari para ahli antara lain :

1. Teori Arthur Lewis

Teori Arthur Lewis menjelaskan tentang pembangunan ekonomi sebagai proses perubahan struktural dari ekonomi tradisional (pertanian) ke ekonomi modern (manufaktur dan jasa) melalui pergeseran tenaga kerja surplus. Model ini didasarkan pada asumsi adanya pasokan tenaga kerja yang tidak terbatas di sektor tradisional, yang upahnya relatif rendah karena produktivitas marjinalnya rendah atau nol. Keuntungan yang dihasilkan di sektor modern mendorong investasi dan ekspansi, sehingga menarik lebih banyak tenaga kerja dari sektor tradisional, yang pada akhirnya memicu terjadinya pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

2. Teori Rostow

Teori pembangunan ekonomi oleh Walt Rostow, yang dikenal sebagai "Teori Tahapan Pembangunan," membagi proses pembangunan menjadi lima tahap yang berbeda. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap tahap:

Masyarakat Tradisional (The Traditional Society)

Pada tahap ini, masyarakat berfokus pada pertanian dengan struktur sosial yang tetap. Ekonomi didominasi oleh pertanian subsisten, menggunakan teknologi yang sederhana, dengan mobilitas sosial yang sangat terbatas.

Pra-Kondisi untuk Tinggal Landas (The Preconditions for Take-Off)

Pada fase ini, terjadi perubahan sosial dan ekonomi yang mempersiapkan masyarakat untuk pertumbuhan. Terdapat investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan teknologi, yang menjadi landasan bagi perubahan struktural.

Tinggal Landas (The Take-Off)

Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi mulai mengalami percepatan. Sektor industri mulai berkembang, investasi meningkat, yang menyebabkan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Menuju Kedewasaan (The Drive to Maturity)

Tahap ini, ekonomi mencapai tingkat stabilitas yang lebih tinggi. Terdapat diversifikasi dalam industri dan peningkatan inovasi teknologi, yang berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Masa Konsumsi Tinggi (The Age of High Mass Consumption)

Pada tahap akhir, ekonomi berkembang dengan pesat, ditandai oleh tingkat

konsumsi yang tinggi. Masyarakat menikmati berbagai barang dan jasa, serta mengalami peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

3. Teori Pembangunan Todaro dan Smith

Todaro dan Smith menyatakan bahwa kemajuan ekonomi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kondisi masyarakat. Sementara itu, pembangunan itu sendiri dipandang sebagai proses yang kompleks, yang melibatkan perubahan signifikan dalam desain yang berkelanjutan, cara pandang yang digunakan, serta peran lembaga publik. Ini termasuk upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemiskinan yang masih ada.

Salah satu tujuan utama dari pembangunan adalah pengentasan kemiskinan. Ini berarti bahwa upaya pembangunan harus terfokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Masyarakat yang terpinggirkan harus diberikan akses kepada sumber daya dan peluang ekonomi agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan yang baik juga harus menciptakan keadilan sosial, di mana kesempatan untuk maju tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, menurut Todaro dan Smith, pembangunan ekonomi adalah proses yang melibatkan pertumbuhan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan distribusi pendapatan. Pendekatan holistik ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam

menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka.

2.1.2 Teori Basis Ekonomi

Menurut Rumokoy dkk. (2022) pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi dua kategori: kegiatan basis dan non-basis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kegiatan basis mencakup sektor-sektor ekonomi yang melayani baik pasar lokal (dalam) maupun pasar luar. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan ke daerah lain. Sebaliknya, kegiatan non-basis adalah aktivitas dalam sektor yang hanya menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat dalam batas wilayah perekonomian lokal. Pada dasarnya inti dari teori basis ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pengembangan industri yang memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menciptakan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan kekayaan serta peluang kerja. Pendekatan basis ekonomi berfokus pada pengembangan kemampuan untuk memproduksi dan menjual hasil produksi secara efisien dan efektif (Arsyad, 2019).

Adisasmita (2018), menjelaskan bahwa semakin banyak sektor basis dalam suatu wilayah, pendapatan wilayah tersebut akan meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan barang dan jasa di wilayah itu serta mendorong pertumbuhan sektor non-basis. Sektor basis berperan sebagai

penggerak utama perekonomian wilayah karena berhubungan langsung dengan permintaan eksternal, sementara sektor non-basis terdorong secara tidak langsung melalui sektor basis. Dengan demikian, sektor basis mencakup kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar lokal maupun regional. Ini berarti bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan ke daerah lain, sedangkan sektor non-basis hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal. Keberadaan sektor basis akan meningkatkan daya saing wilayah dalam menarik investasi dalam negeri maupun asing, yang pada gilirannya dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk fokus pada pengembangan sektor-sektor basis yang dijadikan sebagai prioritas dalam perencanaan dan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Pratiwi (2024) Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk mengidentifikasi suatu sektor atau sub sektor ekonomi tergolong kategori basis atau non basis adalah dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ), yaitu dengan membandingkan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor i terhadap total PDRB pada tingkat wilayah dan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor i terhadap total PDB pada tingkat nasional. Apabila nilai LQ suatu sektor ekonomi ≥ 1 , maka sektor ekonomi tersebut merupakan sektor basis dalam perekonomian daerah yang bersangkutan, sedangkan jika nilai LQ suatu sektor atau sub sektor ekonomi < 1 , maka sektor atau sub sektor ekonomi tersebut merupakan sektor non basis dalam perekonomian daerah yang bersangkutan.

Menurut Soleh dan Maryoni (2017), logika dasar LQ adalah teori basis ekonomi yang intinya adalah karena industri basis menghasilkan barang-barang

dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan. Penjualan produk ke luar daerah dapat menyumbang pendapatan bagi daerah. Pendapatan yang diperoleh dari luar daerah menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi (consumption, C) dan investasi (investment, I) di daerah tersebut. Hal tersebut selanjutnya akan menaikkan tingkat pendapatan daerah dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap industri basis, tetapi juga menaikkan permintaan akan industri non basis (lokal). Kenaikan permintaan (demand) ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan dan juga industri lain. Metode Location Quotient (LQ) bisa juga diterapkan untuk melihat perbandingan antara pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan (tenaga kerja) total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat nasional terhadap total pendapatan (tenaga kerja) nasional.

Menurut Daeng dkk. (2023), teknik Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu aktivitas (perekonomian) di suatu daerah dengan membandingkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah tersebut dengan kontribusi sektor sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Terdapat dua jenis LQ, yaitu LQ statis (Static Location Quotient, SLQ) dan LQ dinamis (Dynamic Location Quotient, DLQ). Teknik LQ ini berguna untuk menentukan kapasitas ekspor ekonomi daerah dan tingkat relevansi suatu sektor.

Dalam metode ini, kegiatan ekonomi dibagi menjadi dua kategori:

- a. Sektor yang melayani pasar lokal maupun luar daerah, yang dikenal sebagai sektor basis.

b. Sektor yang hanya melayani pasar lokal, yang disebut sektor non-basis atau sektor lokal.

Kelemahan dari metode LQ terletak pada sifatnya yang statis, karena hanya mencerminkan keadaan pada satu waktu tertentu. Artinya, sektor basis (unggulan) saat ini mungkin tidak akan terus unggul di masa mendatang, sedangkan sektor yang saat ini dianggap non-basis dapat menjadi unggulan di masa depan. Untuk mengatasi kelemahan ini dan mendeteksi perubahan dalam sektor, analisis varians LQ yang dikenal sebagai DLQ (Dynamic Location Quotient) dapat digunakan, yang memperhitungkan laju pertumbuhan dengan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral atau PDRB memiliki rata-rata laju pertumbuhan tahunan yang berbeda-beda selama periode antara tahun awal dan tahun yang berjarak (Sambodo 2002).

Adapun konsep DLQ menurut Hakim dkk. (2020) adalah :

- a. Jika nilai $DLQ > 1$ berarti sektor-sektor ekonomi dapat dipastikan sebagai sektor basis di masa yang akan datang
- b. Jika nilai $DLQ < 1$ berarti sektor sektor ekonomi tidak dapat dipastikan sebagai sektor basis di masa yang akan datang.

2.1.3 Teori Perubahan Struktur Ekonomi

Menurut Djam'an et al. (2025), Teori perubahan struktural menekankan pada proses transformasi ekonomi di negara-negara berkembang yang sebelumnya berfokus pada sektor pertanian dan bersifat subsisten, beralih ke struktur ekonomi yang lebih maju dengan dominasi sektor non-primer, terutama pada sektor industri dan jasa. Dalam analisis perubahan struktur ekonomi,

terdapat teori yang sering dirujuk, yaitu teori migrasi yang dikemukakan oleh Arthur Lewis.

Teori pembangunan yang dikemukakan oleh Lewis, yang dikenal sebagai model dua sektor, juga diidentifikasi sebagai teori migrasi yang membahas surplus tenaga kerja pada sektor pertanian. Teori ini menjelaskan dinamika pembangunan antara kawasan perkotaan dan pedesaan, di mana investasi serta kebijakan upah di sektor modern atau industri menjadi penyebab utama urbanisasi. Lewis menekankan perubahan struktural dalam ekonomi yang sebelumnya berorientasi pada subsistensi.

Model perubahan struktural yang diajukan oleh Lewis mengasumsikan bahwa: a) tingkat pergerakan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja di sektor perkotaan berbanding lurus dengan laju akumulasi modal di daerah tersebut. Semakin cepat akumulasi modal, semakin tinggi pertumbuhan di sektor modern atau sekunder dan semakin cepat pula penciptaan lapangan kerja. b) Terdapat surplus tenaga kerja di daerah sektor primer atau pertanian. c) Proses pertumbuhan sektor modern dan perluasan kesempatan kerja akan terus berlanjut dengan upah riil yang tetap di pedesaan, hingga surplus tenaga kerja di pedesaan terserap oleh sektor industri di kota. Lewis menjelaskan bahwa pemindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri berlangsung secara bertahap, dan pertumbuhan kesempatan kerja di sektor modern dapat meningkatkan output di sektor tersebut. Ini menyebabkan laju pertumbuhan sektor industri semakin meningkat (Todaro, 2015).

2.1.4. Konsep Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang penting dalam produksi, selain tanah (*land*) dan modal (*capital*). Sumber daya manusia dapat menghasilkan barang dan jasa dari tanah (*land*) dan modal (*capital*). Dalam tenaga kerja terdapat dua konsep utama, yaitu sumber daya manusia sebagai (*human resources*) dan modal manusia (*human capital*). Sumber daya manusia dianggap sebagai *human resource* karena terbatas dan bisa habis jika digunakan terus-menerus. Sementara itu, sebagai *human capital* manusia dipandang sebagai investasi yang memiliki nilai dan dapat memberikan keuntungan dalam bentuk peningkatan produktivitas jika dikelola dengan baik (Madris, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Menurut Tyas (2020) tenaga kerja adalah seseorang yang menggunakan kemampuannya untuk berkontribusi atau menghasilkan sesuatu (barang dan jasa) untuk mendapatkan balas jasa atau gaji. Tenaga kerja yang ada pada wilayah atau negara berkembang berperan dalam memproduksi barang yang dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun untuk masyarakat. Negara berkembang cenderung berorientasi labor intensif, artinya industri membutuhkan tenaga kerja lebih banyak dalam memproduksi suatu barang atau jasa, karena dianggap lebih murah dibandingkan menggunakan teknologi.

Badan Pusat Statistik Maluku Utara (2024), menjelaskan konsep ketenagakerjaan di Indonesia sebagai berikut :

a. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas.

b. Penduduk yang termasuk Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

c. Penduduk yang termasuk Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan pensiunan.

d. Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar

e. Penganggur terbuka

Penganggur terbuka, terdiri dari :

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mempunyai pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai kerja.

2.1.5. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan angkatan kerja yang mencari pekerjaan, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat pendidikan,

keterampilan tenaga kerja, serta kebijakan pemerintah. Peningkatan kesempatan kerja yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran. Dengan kata lain kesempatan kerja juga menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengembangkan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Tingkat Kesempatan Kerja adalah indikator yang menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Dengan kata lain indikator ini menghitung peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat Kesempatan Kerja dihitung dengan mencari persentase dari perbandingan antara jumlah penduduk bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rumus Tingkat Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut:

$$\text{TKK} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Keterbatasan kesempatan kerja terjadi karena ketidakmampuan sektor-sektor menyerap tenaga kerja yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang meningkat dari tahun ke tahun. pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan sektor perekonomian, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran.

Menurut Fajriya dkk. (2024), penyerapan tenaga kerja merujuk pada populasi yang sudah bekerja dan tersebar di berbagai sektor-sektor ekonomi. Sementara itu, Kuncoro (2002), menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang telah terisi, yang tercermin dari banyaknya penduduk yang sudah berpartisipasi dalam dunia kerja.

Sektor-sektor yang mempekerjakan banyak tenaga kerja umumnya menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup signifikan. Setiap sektor mengalami tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda, begitu pula dengan kemampuan masing-masing sektor dalam menyerap tenaga kerja. Variasi dalam laju pertumbuhan ini mengakibatkan dua hal penting. Pertama, ada perbedaan dalam tingkat peningkatan produktivitas kerja di setiap sektor. Kedua, terjadi perubahan struktural secara bertahap, baik dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun kontribusi masing-masing sektor dalam perekonomian terhadap pendapatan nasional.

2.1.6. Teori dan Konsep Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merujuk pada jumlah individu yang bekerja di berbagai sektor-sektor ekonomi. Salah satu masalah utama dalam ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi adalah ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja. Tingginya jumlah tenaga kerja yang diserap oleh suatu sektor ekonomi dapat menggambarkan kemampuan sektor tersebut dalam menyerap angkatan kerja. Oleh karena itu, proporsi pekerja berdasarkan jenis lapangan kerja menjadi salah satu indikator untuk menilai potensi sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Struktur ekonomi di Indonesia umumnya diperoleh dari komposisi penduduk regional berdasarkan sektor-sektor ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh suatu sektor dapat mencerminkan kapasitas ekonomi untuk menyerap tenaga kerja (Sitanggang dan Djalal, 2004).

Menurut Trianto (2017) Koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: yaitu persentasi

pertumbuhan tenaga kerja pertahun dibanding dengan persentasi pertumbuhan PDRB pertahun. Rumus Koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas Kesempatan Kerja} = \frac{\% \text{ Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja}}{\% \text{Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)}}$$

Dengan konsep elastisitas, analisis perubahan penyerapan tenaga kerja akibat perubahan pertumbuhan ekonomi akan digolongkan menjadi lima jenis tipe elastisitas yaitu elastis sempurna, inelastis sempurna, elastis, inelastis, dan uniter. Pada kasus elastisitas kesempatan kerja, penjelasan kategori elastisitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inelastis sempurna adalah perubahan PDRB tidak mengubah jumlah pertumbuhan jumlah tenaga kerja walaupun pertumbuhan PDRB mengalami kenaikan atau penurunan. Nilai koefisien elastisitasnya adalah 0 (nol).
2. Elastis sempurna adalah apabila pertumbuhan jumlah tenaga kerja akan tetap terjadi walaupun tidak terjadi pertumbuhan PDRB. Nilai koefisien elastisitasnya adalah tidak terhingga (∞).
3. Elastisitas uniter adalah elastisitas yang mempunyai koefisien elastisitas permintaan sebesar 1 (satu). Elastisitas ini menggambarkan keadaan apabila persentase pertumbuhan ekonomi akan sebanding dengan persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja
4. Tidak elastis (inelastis) adalah keadaan di mana persentase perubahan PDRB lebih besar dari pada persentase perubahan jumlah tenaga kerja. Nilai koefisien elastisitasnya kurang dari 1 (satu).
5. Elastis adalah keadaan di mana persentase perubahan PDRB lebih kecil daripada persentase perubahan jumlah tenaga kerja. Nilai koefisien

elastisitasnya lebih dari 1 (satu).

2.2 Tinjauan Empiris

Pada bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan penelitian-penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

Kamal (2024), melakukan penelitian dengan judul Analisis Sektor Unggulan Dalam Upaya Pembangunan Wilayah Kabupaten Rembang (2018-2022). Penelitian ini menggunakan metode LQ dan DLQ untuk mengidentifikasi sektor unggulan di Kabupaten Rembang pada tahun 2018-2022. Berdasarkan hasil analisis LQ dan DLQ di kota tersebut, dapat diketahui bahwa sektor unggulan pada Kabupaten Rembang berdasarkan perhitungan data PDRB atau menunjukkan nilai $LQ > 1$ dan $DLQ > 1$ pada tahun 2018-2022 sebanyak 6 (Enam) sektor, antara lain Pertambangan dan Penggalan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya.

(Frissillia and Iryani, 2025), meneliti tentang “Optimization of Growth and Economic Development in Bukittinggi City Through Identification and Development of Leading Sectors Using Location Quotient (LQ), Shift Share, and Klassen Typology Analysis Methods” Pada penelitian ini, untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan Kota Bukittinggi dengan menggunakan analisis *Location Quotient* dan *tipologi Klassen*. Sedangkan untuk melihat daya saing ekonomi digunakan analisis *shift share*. Pada Kota Bukittinggi sektor yang diklasifikasikan sebagai sektor basis adalah sektor jasa Pendidikan; pengadaan Listrik dan gas;

Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya; Jasa Keuangan dan Asuransi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Real Estate; Jasa Perusahaan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan lain-lain. Dalam analisis Shift-Share yang dilakukan di Kota Bukittinggi, pada hasil *National Share (Nr)* sektor dengan kontribusi terbesar di Kota Bukittinggi adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan lain-lain. Adapun hasil *Proportional Shift (Pr)* Sektor yang menunjukkan pertumbuhan yang cepat atau yang memiliki nilai *Pr* positif di Kota Bukittinggi adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa lainnya. Sementara hasil *Differential Shift (Dr)* sektor Transportasi dan Pergudangan mempunyai nilai *Dr* teratas dengan angka positif, yang menunjukkan keunggulan kompetitif atau daya saing lokal yang kuat. Penjumlahan seluruh komponen *Nr*, *Pr* dan *Dr*, yang mencerminkan perubahan total nilai PDRB pada masing-masing sektor, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil; dan Sepeda Motor menunjukkan peningkatan tertinggi dalam total PDRB.

Jaya dkk. (2021), melakukan penelitian yang berjudul “Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Palu” dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Palu 2017-2020. Dari hasil perhitungan tingkat kepekaan tenaga kerja terhadap PDRB sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi di Kota Palu tahun 2019-2020. Pada tahun 2019 nilai elastisitas kesempatan kerja di Kota Palu sebesar 0,16 artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen maka akan menyerap tenaga kerja sebesar 0,16

persen. Pada tahun 2020 nilai elastisitas kesempatan kerja sebesar -0,22 artinya ketika terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen justru menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 0,22 persen. Hasil yang ditemukan bahwa elastisitas kesempatan kerja di Kota Palu masuk kedalam kategori Inelastis karena nilainya < 1 . Sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun 2019-2020 pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum dapat memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Palu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

(Amalia dan Yulistiyo, 2020), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Peran Sektor Basis dan Non-Basis dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik”. Peneliti menggunakan metode analisis Location Quotient, Shiftshare dan Model Rasio Pertumbuhan untuk mengidentifikasi sektor basis dan non basis serta pertumbuhannya, kemudian peneliti juga mengidentifikasi penyerapan tenaga kerja sektor basis dan non basis di Kabupaten Gresik menggunakan analisis elastisitas tenaga kerja dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil perhitungan dari rata-rata LQ menunjukkan bahwa sektor yang menjadi basis di Kabupaten Gresik adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor pengadaan listrik dan gas. Rata-rata nilai elastisitas tenaga kerja di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa seluruh sektor memiliki nilai elastisitas yang positif, hanya sektor pertanian yang memiliki nilai negatif. Hal tersebut berarti setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% pada sektor pertanian maka akan menurunkan jumlah tenaga kerja sektor tersebut. Pada tahun 2017 nilai elastisitas penyerapan tenaga kerja meningkat menjadi 5,34 yang berarti bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen mampu meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja sebesar 5,34 persen.

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam rangka membangun perekonomian wilayah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi data utama pada penelitian ini, oleh karena itu PDRB daerah harus diketahui terlebih dahulu. Dalam hal ini PDRB Kab/Kota Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari 17 sektor ekonomi antara lain; sektor pertanian, pertambangan dan penggalan, Industri Pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan, eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, Informasi dan komunikasi keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta Jasa lainnya.

Sektor-sektor tersebut akan dihitung menggunakan analisis *Location Quotient (LQ)* dan *Dynamic Location Quotient (DLQ)*, *Shift-Share*, serta elastisitas kesempatan kerja. Untuk mengetahui apakah suatu sektor termasuk sektor basis atau non basis adalah dengan menggunakan metode *Location Quotient (LQ)* dan mengetahui apakah sektor basis tersebut tetap menjadi sektor unggulan di masa depan dengan menggunakan metode *Dynamic Location Quotient (DLQ)*.

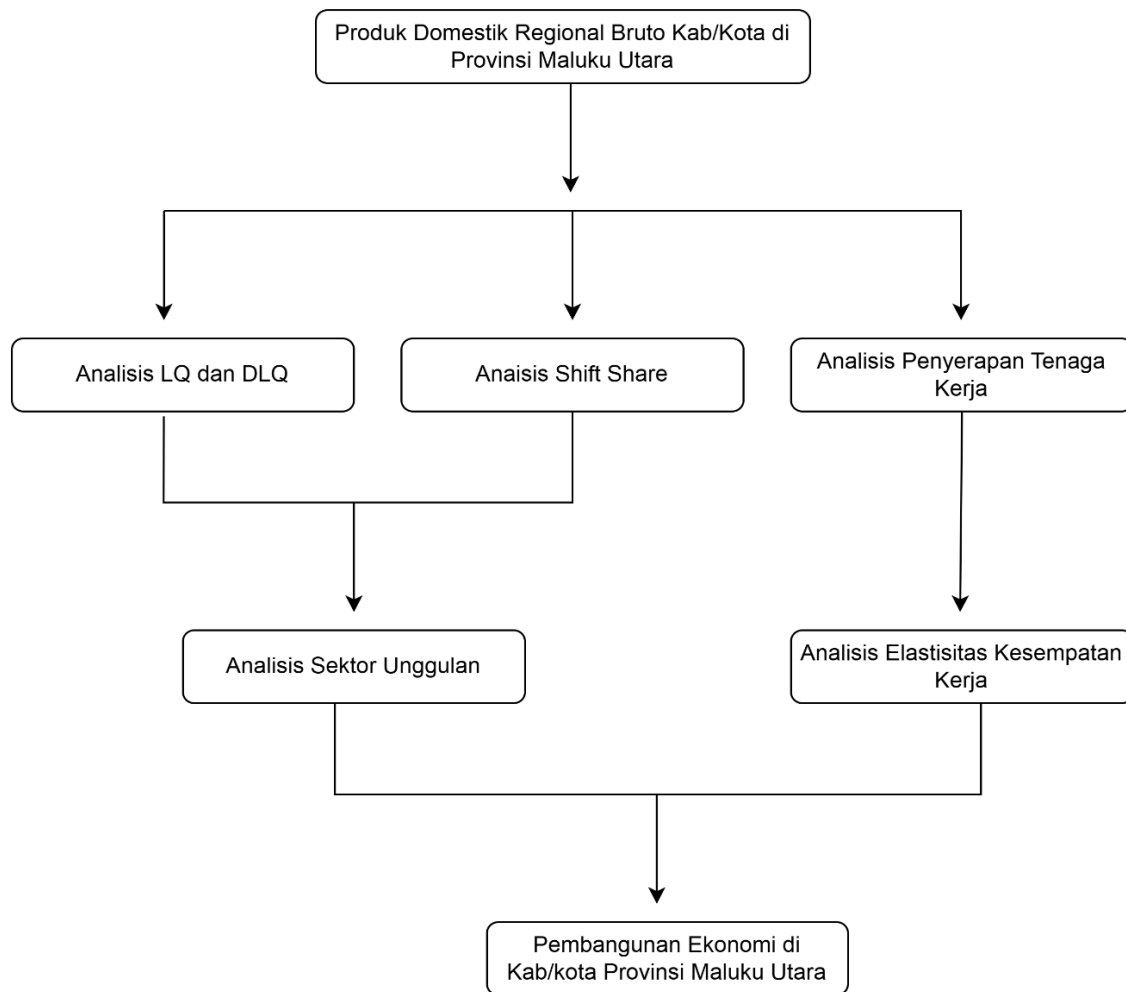
Dari hasil perhitungan LQ, maka akan didapatkan sektor yang menjadi basis ekonomi daerah dan sektor non-basis. Sektor basis akan menjadi fokus pengembangan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadi rekomendasi untuk pemerintah/kota daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode DLQ atau mengukur apakah suatu sektor ekonomi dapat tetap menjadi sektor basis dimasa yang akan

datang, jika nilai $LQ > 1$ dan $DLQ > 1$, maka sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor basis dan prospektif. Kemudian analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran struktur pada sektor perekonomian wilayah di Kab/Kota Provinsi Maluku Utara. Dalam analisis ini akan diukur tiga komponen utama, *National Share*, *Proportional Shift*, dan *Differential Shift*.

Selanjutnya analisis sektor unggulan, jika hasil analisis $LQ > 1$, $DLQ > 1$, dan shift-share menunjukkan hasil yang positif, maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor unggulan. Sektor unggulan dapat dijadikan sebagai acuan pembangunan sektor ekonomi di Kab/Kota Provinsi Maluku Utara di masa depan.

Sedangkan Analisis Elastisitas kesempatan kerja digunakan untuk mengetahui bagaimana perubahan permintaan tenaga kerja akibat adanya perubahan pada tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga dapat dilihat kemampuan penyerapan tenaga kerja pada Kab/kota Provinsi Maluku Utara. Melalui pendekatan elastisitas, penelitian ini berupaya mengukur sejauh mana perubahan PDRB suatu wilayah akan diikuti oleh perubahan jumlah tenaga kerja yang terserap (employment absorption) atau kesempatan kerja yang tersedia bagi tenaga kerja di wilayah Kab/Kota Provinsi Maluku Utara. Sehingga, analisis ini tidak hanya menunjukkan apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, tetapi juga menilai apakah pertumbuhan ekonomi tersebut mampu menciptakan kesempatan kerja secara memadai.

Berdasarkan uraian diatas, berikut dapat disajikan kerangka analisis dalam penelitian yang dapat dilihat melalui gambar 2.1 yaitu :



Gambar 2.1 Kerangka Analisis

2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga bahwa sektor pertambangan dan industri pengolahan menjadi sektor unggulan di seluruh Kab/kota Provinsi Maluku Utara.
2. Diduga bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak di seluruh Kab/kota Provinsi Maluku Utara.